

ANALISIS NILAI TUKAR RUPIAH DAN ASPEK PERPAJAKAN PADA SELISIH NILAI TUKAR (KURS) ATAS PT X TULUNGAGUNG

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI



A. 137/07
Tr
a

DIAJUKAN OLEH :

WINDA TRIMULYATI

NO. POKOK : 040123706-E

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006



SKRIPSI

**ANALISIS NILAI TUKAR RUPIAH DAN ASPEK PERPAJAKAN
PADA SELISIH NILAI TUKAR DI PT. "X" TULUNGAGUNG**

DIAJUKAN OLEH :

WINDA TRIMULYATI

No. Pokok : 040123706-E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. H. Heru Tjaraka, Msi, Ak
NIP. 132 054 304

Tanggal 19-10-2006

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI,



Drs. M. Suyunus, MAFIS, Ak
NIP. 131 287 542

Tanggal 10-09-2007.

Surabaya,.....*6-2-2006*

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen pembimbing



Heru Tjaraka

Drs. H. Heru Tjaraka, Msi, Ak
NIP. 132 054 304

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana yang penulis harapkan. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Airlangga.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik membangun dan saran sebanyak-banyaknya dari para pembaca.

Pada kesempatan kali ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, masukan, bantuan dan motivator kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Ec. H. Karyadi Mintaroen. MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak Drs. Suyunus, MAFIS, Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak Drs. H. Heru Tjaraka, Msi. Ak selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya serta memotivasi penulis menyelesaikan skripsinya dengan ikhlas dan sabar.
4. Ayah dan Bundaku tercinta adik Diah ku tersayang, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, do'a yang tulus, dukungan dan rasa optimisnya, sehingga penulis tak putus-putusnya untuk melanjutkan skripsi ini.

5. Keluarga kecil Dudik Hendrawan, mbak Ira dan si mungil Awan, terima kasih atas home staynya dan bantuan moril yang ikhlas diberikan.
6. Keluarga kecil Toni Febrianto, Dian dan Adek Dito atas perhatian dan semangatnya
7. Kakak, teman berbagi, sahabatku, kekasihku Nurman, terima kasih atas cinta yang tulus, setia dan kesabaran yang tak pernah putus, sehingga penulis tetap optimis menyelesaikan skripsinya.
8. Keluarga besar PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk, cabang Tulungagung, terima kasih atas kesempatan dan masukan yang berarti selama ini.
9. Sahabat-sahabat terbaikku, Maya, Enin, Ita, Novita (thanks atas notebooknya), Nana, Abe, Pak Hadi atas doanya.
10. Sahabat sejatiku, Upix, Anik, teman-teman Tira Fashion, dan rekan-rekan Akuntansi ekstensi angkatan 2001.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan moral dan spiritualnya.

Akhirnya penulis mohon kepada memohon kepada Allah SWT, semoga segala karunia, rahmat dan hidayah yang tak pernah putus diberikan dapat memberi manfaat bagi penulis, dan lingkungan disekitarnya dalam bagian dari pengabdian diri kepada Allah SWT, bangsa, agama dan keluarganya.

Penulis

ABSTRAK

Nilai tukar sejak diterapkannya sistem nilai tukar mengambang mulai mengalami fluktuasi dan semakin tidak terkendali di saat ditetapkan sistem nilai tukar mengambang bebas. Dalam sistem baru ini, Bank Indonesia semakin banyak menyerahkan penentuan kurs devisa pada mekanisme pasar dan mengurangi intervensi yang bertujuan untuk mengamankan cadangan devisa. Namun di sisi lain, hal ini berdampak pada produktivitas kerja dan perkembangan perusahaan khususnya yang bergerak di bidang industri skala besar. Dampak yang ditimbulkan selain terjadinya inflasi juga menimbulkan kerugian selisih kurs pada laba rugi perusahaan yang ditimbulkan dari transaksi luar negeri dan investasi yang ditanamkan dengan menggunakan valuta asing.

Pendekatan pada penelitian ini adalah studi kasus tanpa variabel penelitian. Jenis datanya adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, PT X berupaya melakukan penyesuaian laba rugi terhadap perubahan kurs mata uang yang disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan perpajakan di Indonesia.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa tujuan dari analisis nilai tukar pada selisih kurs yang terdapat pada PT X Tulungagung adalah untuk mengetahui faktor-faktor penentu nilai tukar mata uang (rupiah) dan terjadinya selisih nilai tukar rupiah serta perlakuannya ditinjau dari aspek perpajakan yang ada, dampak yang timbul dari perbedaan nilai kurs mata uang rupiah pada awal tahun dan akhir tahun buku dikarenakan kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil akibat inflasi serta penyajian laporan keuangan perusahaan yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam hal ini apabila terjadi kerugian akibat selisih kurs, maka kerugian tersebut dapat dibebankan pada akhir tahun sesuai dengan sistem pembukuan yang dianut serta dilakukan dengan taat asas, namun apabila terjadi keuntungan akibat selisih kurs maka dalam Undang-undang no. 17 tahun 2000, keuntungan tersebut merupakan objek pajak penghasilan, namun UU Perpajakan tidak mengenal adanya "kapitalisasi" kerugian atau keuntungan selisih kurs, kecuali kalau ada kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter.

Kata kunci : Selisih kurs, nilai tukar, pajak penghasilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Skripsi	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Nilai Tukar	9
2.2 Sistem Nilai Tukar	10
2.2.1 Sistem Nilai Tukar Tetap	10
2.2.2 Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali	12

2.2.3 Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas	12
2.3 Teori Penentuan Nilai Tukar	15
2.3.1 Pendekatan Moneter	16
2.3.2 Pendekatan Paritas Daya Beli	17
2.3.3 Pendekatan Portofolio Balance	18
2.4 Transaksi Mata Uang Asing Menurut Standar Akuntansi	19
2.4.1 Definisi dan Konsep Pertukaran Mata Uang Asing	20
2.4.2 Ketentuan Transaksi Mata Uang Asing Dalam PSAK	21
2.5 Pengertian Nilai tukar menurut Ketentuan Undang-undang Perpajakan	23
BAB 3 METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan Penelitian	25
3.2 Jenis Dan Sumber Data	25
3.3 Rancangan Penelitian	26
3.4 Prosedur Pengumpulan Data	26
3.5 Teknik Analisis Data	28
BAB 4 PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	29
4.1.1 Landasan Hukum	30
4.1.2 Struktur Organisasi PT X	32
4.1.3 Gambaran Umum Produk X	33
4.2 Hasil Analisis	34

Bab 5 Kesimpulan dan Saran	47
5.1 Simpulan	47
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Penetapan Nilai Tukar Dalam Sistem Nilai Tukar Tetap 11

Gambar 2.2

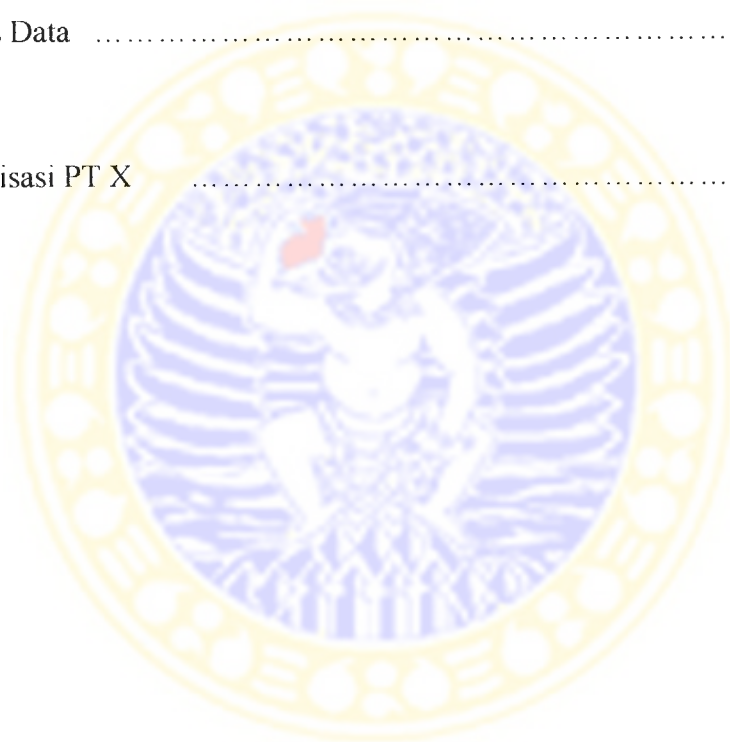
Penetapan Nilai Tukar Dalam Sistem Nilai Tukar Mengambang 13

Gambar 3.1

Model Analisis Data 28

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT X 32



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Indikator Dasar Makroekonomi Indonesia 1992-1996	2
--	---

Tabel 1.2

Indikator Dasar Makroekonomi Indonesia 1997-2003	3
--	---

Tabel 2.1

Perkembangan Nilai Tukar Nominal 1996-2003	15
--	----

Tabel 4.1

Equitas dan Share Holder	34
--------------------------------	----

Tabel 4.2

Laporan laba rugi fiskal tahun 2000-2001	35
--	----

Tabel 4.3

Laporan laba rugi fiskal tahun 2001-2002	36
--	----

Tabel 4.4

Laporan laba rugi fiskal tahun 2003-2004	37
--	----

Tabel 4.5

Laporan laba rugi fiskal tahun 2004-2005	38
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Ijin Penelitian dari Perusahaan PT X

Lampiran 2

Laporan Kontribusi PT X Tahun 2000

Lampiran 3

Laporan Arus Kas PT X Tahun 2003-2004

Lampiran 4

Laporan Neraca Keuangan PT X Tahun 2004

Lampiran 5

Peraturan Perpajakan Tentang Selisih Kurs



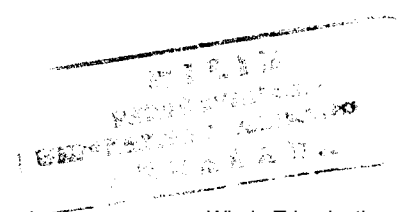
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kondisi perekonomian negara telah mengalami pasang surut pasca krisis multidimensi tahun 1997, dan berakibat pada dikeluarkannya beberapa kebijakan yang berdampak pada fluktuasi nilai tukar rupiah. Seperti diketahui apabila nilai mata uang suatu negara menguat, maka perekonomian negara tersebut dapat dikatakan meningkat dibandingkan dengan negara lain. Sehingga nilai tukar juga dapat digunakan sebagai indikator perekonomian suatu negara. Suatu kenyataan yang harus dihadapi pelaku pasar atau investor di pasar keuangan adalah “*live in turbulence situation*” dimana ragam komoditas yang diperdagangkan tidak terbatas pada mata uang, tetapi juga menyediakan instrumen lain seperti obligasi ataupun saham sebagai komoditas utama. Apalagi aktivitas pasar yang terus menerus selama 24 jam non stop dan tidak lagi mengenal waktu maupun batas negara membuat fluktuasi yang terjadi di pasar berlangsung dalam hitungan detik dan menimbulkan gairah bagi pelaku pasar atau investor. Pasar uang sebagai salah satu pasar yang paling *hectic*, daya tariknya sangat dipengaruhi pergerakan kurs yang dialami satu mata uang. Fluktuasi tersebut tidak saja menjanjikan keuntungan yang luar biasa, tetapi juga peluang kerugian yang mengesankan dalam waktu singkat.

Nilai tukar rupiah telah berulang kali mengalami pasang surut, terutama pada saat krisis. Krisis multidimensi yang telah dialami pada tahun 1997 telah mengakibatkan rupiah berfluktuasi tajam. Hal ini dibuktikan dengan perubahan yang



terjadi sebelum dan sesudah krisis. Pada sebelum krisis, kondisi nilai tukar dan variabel makroekonomi lainnya berada dalam taraf normal (tabel 1). Nilai tukar mengalami tingkat depresiasi sebesar 2.4% dan 5.8% per tahun. Hal ini berdampak pada variabel makroekonomi lainnya seperti inflasi. Tingkat inflasi berfluktuasi searah dengan perubahan nilai tukar, namun secara keseluruhan masih menunjukkan tingkat inflasi yang dapat di kendalikan.

Tabel 1.1
Indikator Dasar Makroekonomi Indonesia 1992-1996

Keterangan	1992	1993	1994	1995	1996
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.46	6.5	7.54	8.22	7.98
Tingkat Inflasi (%)	5.04	10.18	9.66	8.96	6.63
Neraca Pembayaran (US\$ million)	1743	741	806	1516	4451
Cadangan devisa (US\$ Million)	11611	12352	13158	14674	19125
Nilai tukar (Rp/US\$)	2062	2110	2200	2308	2383

Sumber: Bank Indonesia (1997)

Pada tahun 1997 terjadi krisis nilai tukar dan berlanjut pada krisis moneter. Antara lain disebabkan oleh tingkat depresiasi perlahan yang diciptakan pemerintah pada periode sebelumnya, karena adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan ekspor non migas di Indonesia. Tingkat depresiasi tersebut jauh di bawah tingkat depresiasi riilnya, sehingga menyebabkan *overvaluation* pada nilai kumulatifnya yang diduga sebagai pemicu krisis. Secara tidak langsung, peristiwa tersebut berdampak pada variabel makroekonomi lainnya. Variabel-variabel tersebut

di antaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan neraca pembayaran. Tingkat inflasi di Indonesia meningkat sangat tajam pada tahun 1998. peristiwa ini peristiwa politik (sidang umum MPR, pergantian kepala pemerintahan) serta menurunnya kepercayaan dunia luar terhadap situasi keamanan di Indonesia paska kerusuhan Mei 1998. Selanjutnya depresiasi nilai tukar diikuti dengan peningkatan inflasi yang tajam, menyebabkan pertumbuhan ekonomi ikut mengalami penurunan. Kondisi tersebut tidak berlangsung lama sebab terjadi pemulihan sedikit demi sedikit terhadap kondisi Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya apresiasi pada nilai tukar, walaupun pergerakannya tidak stabil (berfluktuatif).

Tabel 1.2
Indikator Dasar Makroekonomi Indonesia 1997-2003

Keterangan	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.675	-13.2	0.2	4.9	3.4	3.7	4.14
Tingkat Inflasi (%)	11.6	77.6	2	9.35	12.6	10.03	5.06
Neraca Pembayaran (US\$ million)	-2.3	4.3	4.0	5	4.7	4	4
Nilai tukar (Rp/US\$)	4650	10088	7850	8400	10255	9316	8572

Sumber : Bank Indonesia (2003)

Keterangan di atas menunjukkan bahwa nilai tukar berperan penting dalam menentukan kondisi perekonomian dan variabel-variabel makroekonomi suatu negara. Menurut Aviyanto (56:2001), nilai tukar dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang sulit dikendalikan dan berada di luar jangkauan pemerintah, misalnya faktor akibat perubahan kebijakan ekonomi di negara maju, dikarenakan mereka menguasai peta kekuatan ekonomi dunia

yang sulit dikontrol, seperti kenaikan suku bunga di USA, atau mulai merangkaknya harga minyak mentah dunia diakibatkan bencana alam di sebagian negara adi daya tersebut. Sedangkan faktor internal merupakan kekuatan yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi nasional suatu negara dan sifatnya dapat dikontrol oleh pemerintah.

Membicarakan mengenai faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar mata uang, apakah akan bergerak menguat (*bullish*) atau sebaliknya melemah (*bearish*) terhadap mata uang lainnya, secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu faktor fundamental dan non fundamental. Pengaruh faktor fundamental dapat terlihat dari perkembangan kinerja ekonomi dan aspek politik dan keamanan negara pemilik mata uang. Sementara, faktor nonfundamental dapat berupa aksi spekulasi pelaku pasar, rumor yang berkembang atau demand yang berlebihan. Bagi negara yang relatif sudah stabil dan maju seperti Amerika Serikat, Eurozone atau Inggris, faktor fundamental berupa kinerja ekonomi memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap nilai tukar mata uang mereka dibandingkan dengan faktor lain, seperti rumor-rumor yang berkembang. Dari sejumlah indikator ekonomi yang berpengaruh, salah satu yang sangat diperhatikan pelaku pasar adalah tingkat suku bunga (*key interest rate*) yang ditetapkan negara bersangkutan. Suku bunga merupakan indikator terpenting dalam menentukan posisi nilai tukar suatu mata uang, dimana juga secara tidak langsung akan berpengaruh kepada aktivitas keuangan dan stabilitas pasar. Fenomena aktivitas yang terjadi di pasar keuangan merupakan gambaran transaksi yang memiliki keterkaitan yang sangat erat antara produk atau instrumen yang

diperdagangkan. Daya tarik mengapa investor bermain di pasar uang atau valuta, tidak semata memanfaatkan selisih kurs tetapi juga disebabkan adanya keterkaitan dengan pasar modal (obligasi) maupun pasar saham. Keterkaitan yang sangat erat antara pasar modal dan pasar uang menjadikan pengaruh suku bunga merupakan branchmark yang paling utama diperhatikan investor di pasar modal. Dengan demikian, naik turunnya sukubunga yang ditetapkan satu negara, pasti akan memberikan dampak langsung terhadap nilai tukar mata uang negara bersangkutan.

Dalam praktiknya, secara histories terlihat pengaruh suku bunga dengan nilai tukar, kecenderungannya akan berkorelasi positif. Dengan kata lain, nilai tukar suatu negara akan memperlihatkan tren menguat terutama untuk jangka pendek apabila di negara bersangkutan muncul kemungkinan akan terjadinya kenaikan tingkat suku bunga. Atau sebaliknya, nilai tukar melemah apabila terjadi penurunan suku bunga.

Lalu bagaimana dengan tinjauan dari sisi perpajakannya? Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang keberadaan selisih nilai tukar yang menghasilkan pendapatan bagi Wajib Pajak, dimana peraturan ini tertuang dalam UU Perpajakan pasal 4 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang penghasilan yang merupakan obyek PPh yang berbunyi *"setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun"*.

Oleh karena itu informasi mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan Indonesia yang berlaku dan berkaitan dengan selisih nilai tukar rupiah sangat

diperlukan oleh berbagai pihak terutama pelaku bisnis, nasabah dan masyarakat yang bermaksud menginvestasikan kekayaannya dalam bentuk valas. Dengan tersedianya banyak informasi tentang nilai tukar, maka masyarakat dapat menganalisis dan merencanakan investasinya tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : “Faktor-faktor apa saja yang menentukan perubahan nilai tukar rupiah dan peluang terjadinya selisih nilai tukar serta bagaimana tinjauan dari sisi perpajakan terhadap selisih nilai tukar rupiah di PT X Tulungagung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penentu nilai tukar mata uang (rupiah) dan terjadinya selisih nilai tukar rupiah dan perlakuannya ditinjau dari aspek perpajakan yang ada, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Penulis memberikan gambaran mengenai kondisi nilai tukar di Indonesia pada saat krisis maupun pasca krisis dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi perubahan nilai tukar rupiah terutama pada tahun 2002-2004.

2. Diharapkan dengan adanya informasi tentang faktor-faktor terjadinya nilai tukar dan akibat yang ditimbulkan, dapat membantu memberi pemahaman kepada Wajib Pajak akan kewajiban yang harus dilakukan di bidang perpajakan.
3. Dapat dipakai sebagai sumber informasi dan referensi untuk peneliti selanjutnya.
4. Penulis memperoleh pemahaman yang lebih tentang selisih nilai tukar dan hubungannya dengan aspek perpajakan yang terkait.

1.5 Sistematika Penyusunan Skripsi

Skripsi ini secara garis besar disusun menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penulisan skripsi, serta sistematika skripsi.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan serta hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai tuntunan dalam penyelesaian pemecahan masalah dalam penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi. Yang terdiri dari penjelasan judul, batasan penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik analisis.

Bab IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan penelitian yang terdiri dari gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan pembahasan masalah secara lebih rinci.

Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan penelitian pada bab sebelumnya dan saran yang dapat diberikan kepada obyek penelitian agar lebih baik di masa-masa mendatang.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Nilai Tukar

Nilai tukar didefinisikan sebagai harga mata uang suatu negara yang dihitung dalam mata uang negara lain, sedangkan menurut Lipsey (1997:18) nilai tukar adalah nilai suatu mata uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu unit mata uang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai tukar merupakan harga dari satu unit mata uang suatu negara diperbandingkan dengan satu unit mata uang negara lain, atau perbandingan antara satu unit mata uang dalam negeri dengan satu unit mata uang luar negeri. Nilai tukar juga dapat dikembangkan maknanya menjadi konversi dan translasi, dimana menurut G.Mueller & Coi (1998:125) konversi merupakan pertukaran fisik anatara satu valuta dengan valuta yang lain. Misalnya, seorang warga negara AS yang sedang berlibur di roma akan mengkonversi dolar kedalam lira jika dia ingin membeli produk Italia. Sedangkan translasi hanya merupakan perubahan dalam ekspresi moneter, seperti ketika neraca yang tadinya diekspresikan dalam euro kemudian disajikan kembali ke dalam dolar AS yang ekuivalen. Dimana tidak ada pertukaran fisik dan tidak ada transaksi yang terjadi. Mekanisme yang digunakan untuk mentranslasikan saldo-saldo valuta asing kedalam valuta domestik yang ekuivalen adalah kurs valuta asing yaitu nilai tukar seperti yang telah dijabarkan sebelumnya.

Transaksi-transaksi valuta asing terjadi di pasar “spot”, “forward” atau “swap” . valuta yang dijual dan dibeli di pasar spot biasanya mesti dikirim segera

yaitu dalam dua hari bisnis. Nilai tukar dalam pasar spot dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain perbedaan tingkat inflasi antara dua negara yang bersangkutan, perbedaan suku bunga nasional dan kekuatan permintaan dan penawaran yang kompleks yang dipengaruhi oleh harapan terhadap pergerakan kurs di masa depan.

2.2 Sistem Nilai Tukar

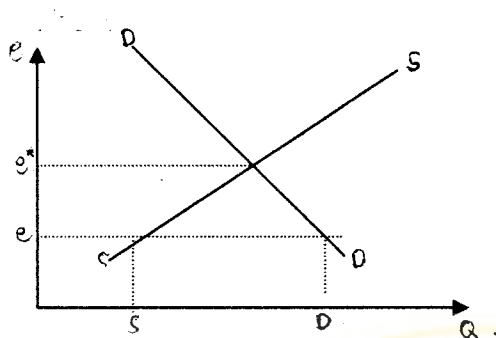
Setiap negara memiliki sistem nilai tukar yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pemerintahan dalam menstabilkan nilai tukar valuta asing yang beredar di negaranya, baik melalui intervensi bank sentral atau mekanisme pasar. Secara umum system yang diterapkan saat ini dibagi menjadi dua yaitu *fixed exchange rate* dan *floating exchange rate*.

2.2.1 Sistem nilai tukar tetap (Fixed exchange rate)

Menurut Anne Kruger (1983:231) system nilai tukar tetap merupakan system mata uang yang konvertibel dalam suatu negara dimana tiap individu bebas melakukan jual beli valuta asing yang diinginkan untuk mempertahankan nilai tukarnya, pemerintah melalui bank sentral akan melakukan jual beli valuta asing pada harga tetap. Untuk itu bank sentral harus memegang sejumlah cadangan devisa untuk membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran sehingga nilai tukar dapat dipertahankan.

Tingkat keseimbangan pada sistem nilai tukar tetap akan dijelaskan pada gambar 1.

Gambar 2.1
Penetapan nilai tukar dalam sistem nilai tukar tetap



Sumber : Batiz 82:1994

Gambar di atas berdasarkan prinsip sistem nilai tukar tetap menunjukkan bahwa saat pemerintah menetapkan nilai tukar di bawah keseimbangan terjadi kelebihan permintaan terhadap nilai tukar. Kelebihan permintaan ini digambarkan sebagai sumbu horizontal, diartikan sama dengan D hingga S . Pada kondisi ini, orang-orang yang berminat untuk membeli valuta asing berharap dapat membeli lebih dari penawaran *supplier*. Kelebihan permintaan ini diatasi oleh bank sentral dengan menjual valuta asing kepada sektor swasta untuk mencegah nilai tukar bergerak ke bawah level yang ditetapkan pemerintah yaitu e . Hal ini berarti selama periode tersebut bank sentral kehilangan cadangan internasional dengan jumlah sebesar D hingga S . Pada sistem ini pemerintah harus menyimpan cadangan internasional untuk memutuskan nilai tukar pada tingkat yang ditetapkan. Kebaikan dari sistem nilai tukar tetap ini adalah adanya kepastian akan nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang negara lain, sehingga para eksportir dan importer dapat memeperhitungkan transaksi perdagangan dengan pihak luar negeri.

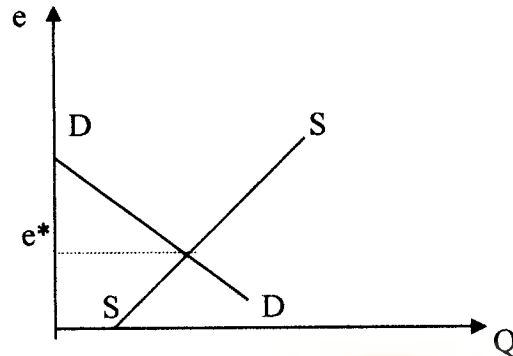
2.2.2 Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (*Managed floating exchange rate*)

Pada system ini, otoritas moneter memiliki wewenang untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing. Hal ini dilakukan untuk melunakkan fluktuasi jangka pendek tanpa bermaksud mempengaruhi tren kurs jangka panjang. Otoritas moneter ini menggunakan cadangan devisa untuk mengatasi kelebihan permintaan valuta asing jangka pendek, sehingga dapat mengurangi tekanan depresiasi yang berlebihan dan sebaliknya. Seberapa besar fluktuasi jangka pendek yang bisa diperlunak oleh otoritas moneter dengan diterapkannya system ini, tergantung pada seberapa besar kesenjangan jangka pendek antara permintaan dan penawaran valuta asing di suatu negara. Pada gilirannya, semua tergantung pada kemauan otoritas moneter untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing, serta tersedianya cadangan devisa, maka lebih besar kemungkinan nilai tukar dapat distabilkan.

2.2.3 Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas (*Free-floating exchange rate*)

Pada sistem ini, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam penentuan nilai tukar. Nilai tukar ditentukan dengan adanya interaksi antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Hal ini berarti tidak ada perubahan dalam cadangan devisa negara yang akan membawa neraca perdagangan selalu dalam kondisi keseimbangan. Kondisi keseimbangan pada sistem nilai tukar mengambang bebas dijelaskan pada Gambar 2

Gambar 2.2
Keseimbangan pada sistem nilai tukar mengambang bebas



Sumber: Batiz 90: 1994

Asumsi untuk gambar tersebut adalah hanya ada dua mata uang yang dipertimbangkan, yaitu mata uang domestik dan mata uang asing. Kurva permintaan sektor swasta untuk valuta asing (DD), menunjukkan jumlah permintaan valuta asing sebagai fungsi dari nilai tukar. Kurva yang berslope negative menggambarkan apabila harga valuta asing meningkat, maka jumlah permintaan valuta asing akan menurun. Harga mata uang asing yang diukur dengan mata uang domestic ditunjukkan oleh e , sedangkan penawaran untuk valuta asing oleh sektor swasta (SS) menunjukkan jumlah penawaran valuta asing sebagai fungsi dari nilai tukar.

Nilai tukar rupiah semenjak diterapkannya sistem nilai tukar mengambang mulai berfluktuasi. Namun, fluktuasi tersebut makin tidak terkendali di saat ditetapkannya sistem nilai tukar mengambang bebas. Analisis dimulai saat sebelum krisis, di mana nilai tukar mengalami depresiasi secara perlahan. Hal ini oleh faktor-faktor moneter, juga diduga adanya kebijakan pemerintah yang depresiatif guna meningkatkan ekspor Indonesia. Depresiasi sebagai strategi untuk meningkatkan

ekspor, ternyata membuat rupiah semakin tertekan. Akhirnya terjadi krisis nilai tukar sebagai bukti kurang konsistennya kebijakan kurs devisa dengan kebijakan fiskal dan moneter. Sementara itu, kebijakan kurs mengambang yang dikendalikan dan tidak didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal yang memadai, merupakan sasaran empuk bagi spekulator sehingga terpaksa ditinggalkan pada tanggal 14 Agustus 1997. Sejak saat itu, nilai tukar nominal rupiah telah bergerak bagaikan “yo-yo” (Nasution 26:1997)

Sejak tahun 1992 hingga 14 Agustus 1997, secara resmi Bank Indonesia terpaksa melonggarkan kendalinya dalam menentukan kurs devisa dan secara resmi beralih pada sistem kurs devisa mengambang. Dalam sistem baru ini, Bank Indonesia semakin banyak menyerahkan penentuan kurs devisa pada mekanisme pasar dan mengurangi intervensi. Hal ini dilakukan untuk mengamankan cadangan devisa. Akhirnya setelah sistem ini diberlakukan nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan-tekanan yang berat baik dari faktor internal maupun eksternal. Semua faktor-faktor ini dalam waktu yang bersamaan dan semua memberikan tekanan yang kuat pada rupiah, sehingga rupiah menyesuaikan dengan fluktuasi yang beragam hingga sampai pada titik terapresiasi pada tahun 2003.

Tabel 2.1
Perkembangan Nilai Tukar Nominal 1992-2003

TAHUN	NILAI TUKAR (Rp/US\$)
1992	2.062
1993	2.110
1994	2.200
1995	2.308
1996	2.383
1997	4.650
1998	8.025
1999	7.100
2000	9.595
2001	10.265
2002	9.261
2003	8.476

Sumber : Bank Indonesia (2003)

2.3 Teori Penentuan Nilai tukar

Menurut Dornbusch (1987:76) dalam teori penentuan nilai tukar terdapat tiga pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan moneter yang mengasumsikan nilai tukar sebagai harga relatif dari uang. Sedangkan pendekatan kedua adalah pendekatan paritas daya beli (*the purchasing-power-parity approach*) dimana nilai

tukar merupakan harga relatif dari suatu barang. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan portofolio, dimana nilai tukar merupakan harga relatif obligasi (*bond*).

2.3.1 Pendekatan Moneter

Humprey (1982:68) mengasumsikan bahwa harga fleksibel dalam jangka panjang, dan paritas daya beli diasumsikan digunakan terus menerus. Artinya perubahan kebijakan moneter diteruskan kepada nilai tukar melalui paritas daya beli bukan melalui saluran tingkat bunga. Dalam pendekatan moneter, kebijakan moneter nasional yang efektif menentukan jalur yang akan dilalui oleh tingkat inflasi dan nilai tukar, karena perubahan dalam permintaan dan penawaran uang merupakan determinan utama terhadap trend inflasi relatif. Pada dasarnya pendekatan moneter menekankan pada beberapa hal, yaitu : *Pertama*, nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari jumlah uang nasional yang ada. *Kedua*, sebagai *asset price*, mempunyai pengaruh yang sama terhadap *asset price* yang lain. *Ketiga*, tingkat keseimbangan dapat dicapai pada saat jumlah uang yang tersedia sama dengan yang diinginkan kedua negara. *Keempat*, pendekatan moneter sangat sensitive terhadap ekspektasi nilai tukar di masa depan, dan ini dikondisikan oleh kebijakan moneter dan indikator lain seperti kebijakan moneter di masa mendatang. *Kelima*, pendekatan ini merefleksikan semua informasi yang ada dari dua mata uang, lalu memberikan informasi baru bila terjadi perubahan pada informasi sebelumnya.

Pendekatan moneter terhadap nilai tukar terdiri atas dua kelompok yaitu model *monetarist* dan *overshooting*. Model *monetarist (flexible prices)* yaitu model yang melihat nilai tukar sebagai harga relatif dari 2 mata uang. Nilai tukar dan faktor

yang menentukan dianalisis dalam bentuk penawaran dan permintaan dari mata uang tersebut. Model ini memiliki asumsi harga sangat fleksibel dalam jangka panjang, *perfect capital mobility* (modal tidak memiliki hambatan untuk masuk dan keluar dari suatu negara), tidak terdapat hambatan dalam pasar barang internasional, barang di dalam dan di luar negeri bersifat substitusi sempurna serta sejumlah uang beredar dan pendapatan nasional riil ditentukan secara eksogen. Selain itu, permintaan uang riil dalam dua negara diasumsikan sebagai fungsi yang stabil terhadap sejumlah variable ekonomi yang terbatas, khususnya tingkat pendapatan oleh bunga.

2.3.2 Pendekatan Paritas Daya Beli

Menurut Humprey (1982:79), teori nilai tukar menurut paritas daya beli menyatakan bahwa keseimbangan jangka panjang nilai tukar nominal ditentukan oleh rasio dan harga domestik relatif terhadap tingkat harga luar negeri. Pada keseimbangan jangka panjang, neraca perdagangan sama dengan nol dan nilai tukar riil diasumsikan tetap. Apabila dirumuskan menjadi persamaan :

$$e = P/P^* \quad (2.1)$$

keterangan :

e = Nilai tukar nominal

P = Harga barang dalam negeri

P* = Harga barang luar negeri

Teori paritas daya beli memiliki dua tipe absolut dan tipe relatif. Tipe absolut menyatakan bahwa keseimbangan nilai tukar sama dengan rasio harga domestik dan harga luar negeri (Persamaan 2.1). Nilai tukar riil diasumsikan sama dengan 1. Nilai tukar riil akan lebih dari 1 apabila harga domestik lebih rendah dibandingkan dengan harga luar negeri (eP^*). Nilai tukar riil akan kurang dari 1 jika harga domestik melebihi harga luar negeri yang dikonversikan ke dalam satuan mata uang dalam negeri. Tipe relatif menyatakan hal yang berbeda, yaitu perubahan pada keseimbangan nilai tukar akan sama dengan perubahan pada rasio tingkat harga. Secara umum, tingkat persentase dari perubahan nilai tukar sama dengan perbedaan presentase tingkat harga (inflasi) antara luar negeri dan domestik. Oleh karena itu, bila inflasi luar negeri melebihi domestik, maka nilai tukar domestik akan terapresiasi. Begitu pula sebaliknya, jika inflasi domestik melebihi luar negeri, maka nilai tukar domestik akan terdepresiasi.

2.3.3 Pendekatan *Portfolio Balances*

Pendekatan portfolio awalnya berkembang pada akhir tahun 1960-an. Pada awal perkembangannya, pendekatan ini menerima intisari dari metode ekonometrika untuk menjelaskan secara empiris perilaku aliran modal yang diamati. Pendekatan Portfolio menegaskan bahwa nilai tukar ditentukan melalui interaksi penawaran dan permintaan atas aktiva keuangan. Apabila pendekatan moneter lebih memfokuskan bahwa nilai tukar ditentukan hanya melalui penawaran dan permintaan terhadap persediaan uang nasional (*national money stock*), maka pendekatan portfolio meluas kepada sejumlah aktiva keuangan yang dapat menentukan nilai tukar.

Perbedaan antara pendekatan moneter dengan pendekatan portfolio adalah dalam pendekatan portfolio, nilai tukar tidak hanya tergantung pada penawaran uang secara relative tetapi juga atas penawaran obligasi secara relatif. Sedangkan dalam pendekatan moneter, obligasi domestic dan luar negeri dianggap substitusi sempurna. Para pemegang aktiva tidak akan mengubah komposisi portfolio obligasinya dalam memegang aktiva, sedangkan pendekatan portfolio melihat obligasi domestic dan luar negeri bersifat substitusi tidak sempurna.

2.4 Transaksi Mata Uang Asing Menurut Standar Akuntansi

Di Indonesia, standar akuntansi yang mengatur tentang transaksi mata uang asing adalah PSAK Tahun 1994 yaitu PSAK No. 10 dan 11 dimana sejumlah pendekatan untuk menjabarkan laporan keuangan dalam mata uang asing ke dalam mata uang domestik meliputi :

1. Metode lancar-tak lancar (*current-non current*), yang menjabarkan akun-akun lancar pada kurs sekarang dan akun-akun tidak lancar pada kurs histories.
2. Metode moneter-non moneter yang mengubah aktiva dan kewajiban moneter pada kurs sekarang serta aktiva dan kewajiban moneter pada kurs histories.
3. Metode temporal, yang mengubah aktiva dan kewajiban yang dinilai pada harga masa lalu, sekarang dan masa depan sedemikian rupa sehingga mereka bisa dinilai dengan prinsip akuntansi yang sama.
4. Metode kurs sekarang, yang menjabarkan seluruh aktiva dan kewajiban pada kurs sekarang

Tujuan penjabaran laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang secara umum sejalan dengan efek ekonomi yang diharapkan dari perubahan kurs pada ekuitas dan arus kas perusahaan serta menggambarkan dalam laporan konsolidasi dari aktivitas finansial serta hubungan dari masing-masing entitas terkonsolidasi sebagaimana dinilai dalam mata uang-mata uang fungsional agar sejalan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2.4.1 Definisi Dan Konsep Pertukaran Mata Uang Asing

Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada bulan Mei 1998 mengubah beberapa definisi tradisional dengan melakukan redefinisi atas mata uang asing dimana mata uang lokal adalah mata uang dari negara tertentu atau mata uang yang dinyatakan dalam kegiatan domestik maupun luar negeri dari negara yang bersangkutan. Berdasarkan standar ini, mata uang asing adalah semua mata uang selain mata uang fungsional dari suatu entitas. Standar ini mengizinkan penggunaan dua metode yang berbeda untuk mengkonversi laporan keuangan dari perusahaan anak di luar negeri ke dalam mata uang domestik berdasarkan mata uang fungsional dari entitas luar negeri.

Tujuan dari suatu mata uang adalah menyediakan suatu standar nilai, alat pertukaran serta unit pengukuran. Namun pada dasarnya semua mata uang berperan sebagai unit pengukuran bagi kegiatan ekonomi di negara-negara bersangkutan. Suatu transaksi dikatakan dinilai dengan mata uang tertentu jika besarnya dinyatakan dalam mata uang tersebut. Transaksi yang terjadi dalam suatu negara biasanya dinilai dan dinyatakan dalam mata uang negara tersebut. Dalam hal transaksi antar entitas bisnis

negara-negara yang berbeda, jumlah hutang dan piutang biasanya dilaporkan dalam mata uang lokal dari negara pembeli atau penjual dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi.

Kurs adalah nisbah antara satu unit mata uang dengan jumlah mata uang lain yang setara dengan mata uang tersebut pada satu waktu. Kurs dapat dihitung langsung yaitu dengan 1 unit mata uang asing disetarakan dengan nominal pada mata uang lokal, misalnya :

$$1 \text{ US\$} = \text{Rp. } 10.000,-$$

sedangkan kurs tidak langsung yaitu menilai mata uang lokal disetarakan dengan mata uang asing, misalnya :

$$1 \text{ Rupiah} = 1/10.000 \text{ US\$}$$

Kurs yang digunakan dalam akuntansi untuk kegiatan dan transaksi luar negeri adalah kurs spot (*spot rate*) yaitu kurs untuk pertukaran yang terjadi langsung pada saat transaksi, kurs sekarang (*current rate*) yaitu kurs dimana satu unit mata uang dapat dipertukarkan dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau tanggal transaksi, dan kurs histories (*historical rate*) yaitu kurs yang berlaku pada tanggal tertentu terjadinya transaksi.

2.4.2 Ketentuan Transaksi Mata Uang Asing Dalam PSAK

Pengertian transaksi luar negeri dan transaksi mata uang asing, dalam ilmu akuntansi, memiliki perbedaan. Transaksi luar negeri adalah transaksi yang terjadi antarnegara-antar perusahaan dari negara yang berbeda. Sedangkan transaksi mata uang asing adalah transaksi di mana nilai tukarnya dinyatakan dalam mata uang asing

selain dari mata uang fungsional suatu entitas. Maka, sebuah transaksi luar negeri tidak otomatis merupakan transaksi mata uang asing. Jenis transaksi luar negeri yang paling sering dilakukan adalah ekspor impor barang dan jasa. Transaksi ekspor maupun impor adalah transaksi luar negeri. Tapi mereka bukanlah transaksi mata uang asing kecuali jika tidak nilai tukarnya dinyatakan dalam suatu mata uang asing-artinya, mata uang selain mata uang fungsional entitas.

Ketentuan yang tercantum dalam PSAK no. 10 hanya diterapkan untuk transaksi mata uang asing dan laporan keuangan mata uang luar negeri. Untuk transaksi mata uang asing selain kontrak berjangka, maka :

1. Pada tanggal transaksi diakui, setiap aktiva, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi tersebut harus dinilai dan dicatat dalam mata uang fungsional dari entitas yang melakukan pencatatan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut.
2. Pada setiap tanggal neraca, saldo yang tercatat dalam mata uang selain mata uang fungsional dari entitas yang melakukan pencatatan harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs sekarang.
3. Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4. Pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi.
5. Pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai transaksi.

2.5 Pengertian Nilai Tukar menurut Ketentuan Undang-undang Perpajakan

Dalam ketentuan perpajakan, nilai tukar mata uang merupakan bagian dari penghasilan yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. Pada pasal 4 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa “Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

- a. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta antara lain :
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha;
- b. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

Undang-undang Pajak Penghasilan (UU No. 10 Tahun 1994) menetapkan bahwa keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan objek penghasilan dan kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan pengurangan penghasilan kena pajak. Dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, keuntungan karena selisih kurs bisa disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya, dikaitkan dengan system pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak, dengan syarat dilakukan secara taat asas. Jika digunakan system pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut.

Dalam prakteknya, pemerintah pernah mengeluarkan keputusan Nomor 185/KMK. 04/1998 tanggal 19 Maret 1998 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas pembelian valuta asing, sifat dan tata cara pelunasan serta pelaporannya. Semula keputusan ini mulai berlaku tanggal 23 Maret 1998, pada tanggal yang sama keluar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 189/KMK.04/1998 yang mencabut keputusan No. 185/KMK.04/1998 tersebut.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, hal ini diterangkan pada panduan dan pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, dimana pendekatan kualitatif yang lebih menekankan untuk mengetahui makna dari suatu fenomena dan dalam proses penelitiannya memperhatikan konteks studi dengan menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi peneliti. Sedangkan metode penelitian menggunakan studi kasus yang dijelaskan secara deskriptif, artinya data yang dipakai adalah data tertulis dan lisan dengan didukung oleh laporan keuangan perusahaan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan :

1. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari riset lapangan yang berupa observasi non-partisipan, karena dalam melaksanakan observasi, peneliti tidak berperan aktif dalam obyek yang diamati (Moleong, 1998 : 288)
2. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari laporan dan data yang diperoleh dari pihak manajemen. Dalam hal ini jenis data yang disajikan adalah laporan rugi-laba, laporan arus kas dan neraca.

Sumber data yang digunakan untuk indikator makroekonomi dalam penelitian ini didapat dari data sekunder yaitu data dalam bentuk deret waktu (*time series*).

Kurun waktu yang digunakan dari tahun 1994 – 2004. Data sekunder berasal dari laporan statistik ekonomi keuangan Bank Indonesia (SEKI BI) dengan laporan pendukung dari laporan keuangan perusahaan serta literature-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.3 Rancangan Penelitian

Penelitian ini berbentuk studi kasus (*case study*) dimana dilakukan pada organisasi PT. X. Penulis berpedoman pada konsep studi kasus Yin (1997;1) dengan alasan :

1. Hubungan antara focus yang terjadi lebih sesuai apabila dianalisa dengan menggunakan studi kasus, karena berusaha memberikan gambaran actual atas fenomena yang sedang dihadapi.
2. Memudahkan penulis memandang masalah yang dihadapi sebagai objek tertentu yang harus diteliti secara lebih rinci dan mendalam.
3. Digunakannya multi sumber sebagai bahan penelitian, tidak hanya berupa dokumen-dokumen melainkan juga hasil observasi dan wawancara.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data harus dilakukan dengan mempertimbangkan tiga prinsip yang dapat menjamin validitas konstruk dan realibilitas studi kasus. Validitas konstruk adalah menetapkan ukuran operasional yang benar untuk konsep-konsep yang akan diteliti, sedangkan realibilitas mengacu pada kesamaan hasil penelitian yang dicapai jika prosedur penelitian yang sama dilakukan kembali. Tiga prinsip pengumpulan data tersebut adalah (Yin,2000 : 14) :

1. Menggunakan multi sumber bukti.

Penggunaan berbagai bukti, temuan atau konklusi apapun baik yang berasal dari wawancara langsung dengan bagian akuntansi, studi literature, majalah, artikel dan internet akan lebih meyakinkan, tepat dan lebih eksploratif.

2. Menciptakan data dasar studi kasus

Data-data hasil temuan didokumentasikan dan dikelompokkan sebagai dasar dari studi kasus yang sedang dilakukan. Kedua aktivitas ini dapat mengandung realibilitas karena mengungkapkan bukti yang dapat ditinjau oleh peneliti dengan mudah.

3. Memelihara rangkaian bukti

Memelihara rangkaian bukti secara berurutan dan tidak terpisah-pisah dimaksudkan untuk mempermudah pengamatan dalam lingkup yang lebih luas. Temuan yang ada baik dari wawancara langsung, laporan keuangan perusahaan, temuan dari buku, majalah, jurnal dan internet dapat digunakan untuk memahami kasus yang sedang dikerjakan dan juga dapat melacak asal bukti sejak dari pertanyaan awal penelitian hingga konklusi akhir studi kasus dan juga dari konklusi pertanyaan awal.

Prosedur pengumpulan data pada skripsi adalah sebagai berikut :

1. Survey pendahuluan

Survey ini dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan dan perlakuan akuntansi serta aspek perpajakannya atas selisih nilai tukar mata uang.

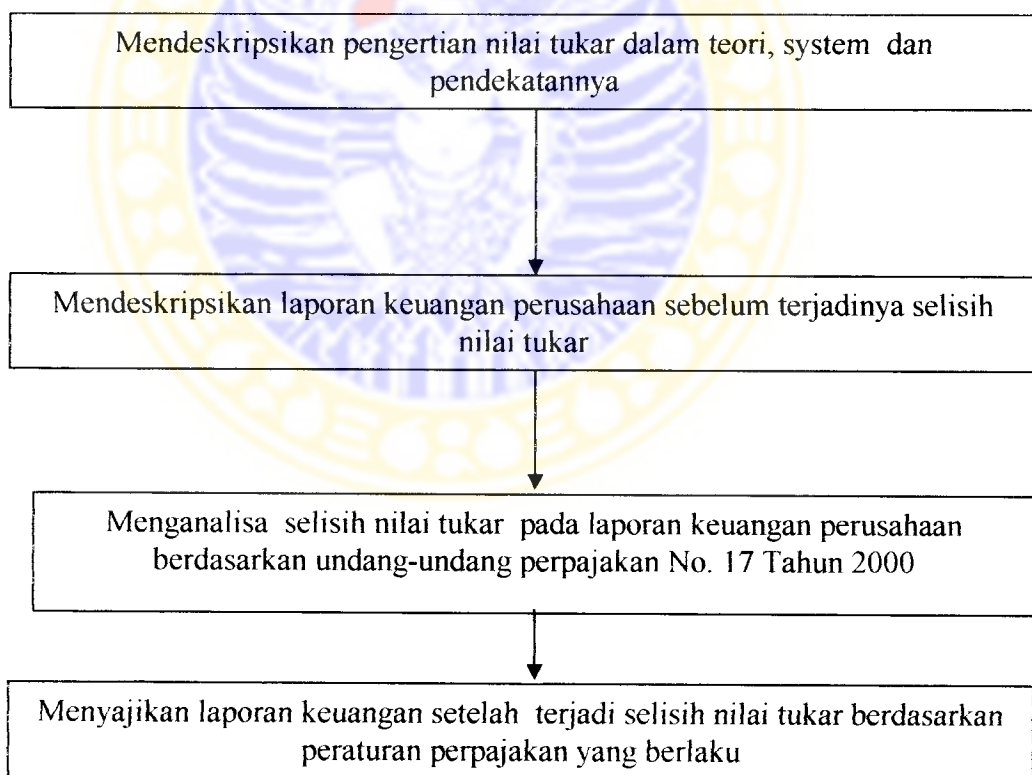
2. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk mempelajari teori-toeri dari buku-buku bacaan, jurnal terkini yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang dilaksanakan untuk mendapatkan landasan dalam penyelesaian masalah yang ada.

3.5 Teknik Analisis Data

Data dari hasil penelitian selanjutnya diolah dan dianalisa secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai berikut :

Gambar 3.1
Model Analisis



Sumber : Data yang diolah Penulis

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT. X bergerak di bidang pembuatan kemasan dalam bentuk kaca. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 29 Oktober 1956, dan penyalaan dapur peleburan pertama dilakukan pada tahun 1959. Dedikasi tinggi dan komitmen dari seluruh karyawan untuk melakukan pengembangan berkesinambungan telah membuat PT. X berkembang pesat. Peningkatan mutu dan kinerja dengan bantuan tenaga ahli lokal dan asing sanggup mengangkat mutu produksi sehingga memenuhi standar internasional. PT. X berhasil mendapatkan pengakuan internasional dengan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000. Adapun Visi dari perusahaan ini adalah "Menjadi salah satu Produsen Kemasan terbaik di kawasan Asia - Pasifik". Yang didukung dengan misi antara lain :

- a. Menghasilkan kemasan yang berkualitas dan terintegrasi.
- b. Mengoptimalkan kepuasan pemegang saham, pelanggan, karyawan dan masyarakat lainnya.
- c. Membangun dan mengembangkan teknologi
- d. Menumbuhkembangkan SDM yang dapat menjawab tantangan

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan maka perusahaan memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu :

“Melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan program Pemerintah dibidang ekonomi, pembangunan nasional pada umumnya dan dibidang industri kemas gelas.”

Sehingga perusahaan menerapkan strategi dengan cara:

1. Menerapkan manajemen profesional dalam perusahaan secara konsisten & konsekwen.
2. Menerapkan pola partnership dengan para pemasok.
3. Menerapkan *relationship marketing* bersama kustomer untuk memperkuat pangsa pasar.
4. Fokus pada efisiensi operasional.
5. Menciptakan mekanisme *built-in control*.

4.1.2 Landasan Hukum

PT X merupakan BUMN yang dibentuk berdasarkan PP No.33 tahun 1978 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Negara menjadi Perseroan, yang dilaksanakan dengan Akta No.3 tanggal 1 Nopember 1979 dari Hadi Moentoro, SH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dalam Surat Keputusan no.YA.5.378/13 tanggal 4 Agustus 1980 serta diumumkan dalam Berita Negara RI No.61 tanggal 23 Januari 1981, tambahan No.7 Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-undang Perseroan No.1 tahun 1995 dengan Akta Notaris No. 68 tanggal 26 Januari 1998 dari Ny. Macharani Moertolo Soenarto, SH. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No. C2-1949.HT.01.04.Th'98 tanggal 20

Maret 1998 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 39 dari Berita Negara No.2612 tertanggal 15 Mei 1998.

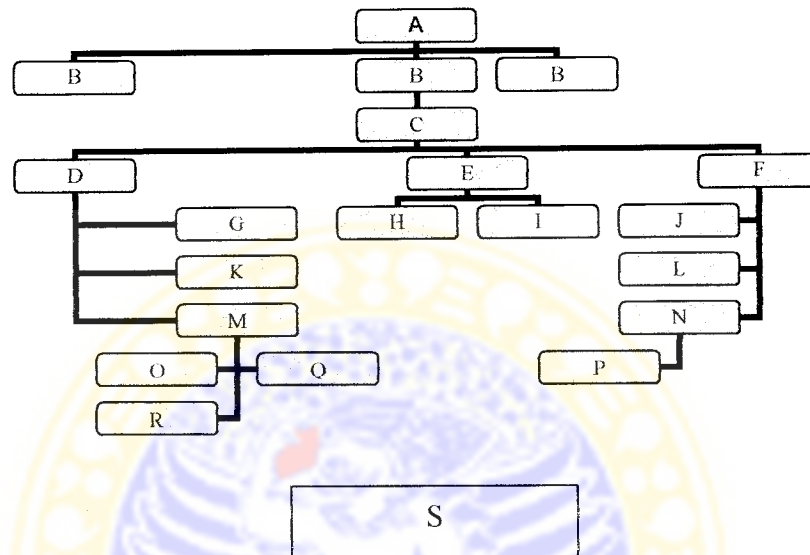
Saat ini PT. X telah menguasai 35% pangsa pasar kemasan gelas di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis botol untuk memenuhi kebutuhan industri bir, minuman ringan, farmasi, makanan dan kosmetika, dengan total kapasitas 465 ton/hari atau 128.500 ton/tahun.

Sumber daya manusia profesional, sistem manajemen terpadu, fasilitas produksi yang canggih, perawatan alat produksi, dan pengawasan mutu yang ketat akan menjamin kelangsungan dan kualitas produksi kami. Perusahaan ini mempunyai dua lokasi pabrik. Pabrik I di kota A dengan luas area + 1,2 ha dan kapasitas 125 ton/hari, dan Pabrik II di kota B dengan luas area + 14,5 ha dan kapasitas 340 ton/hari. Pabrik di kota A memiliki 1 Dapur Peleburan dengan kapasitas 125 ton/hari, sedangkan pabrik di kota B mempunyai 2 Dapur Peleburan yang masing-masing berkapasitas 200 ton/hari dan 140 ton/hari.

Kinerja dan peralatan di setiap unit produksi PT. X dievaluasi secara berkala guna menjaga mutu produksi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi kemasan gelas. PT X membina hubungan baik dengan produsen dan supplier peralatan produksi demi mengikuti perkembangan teknologi terbaru di bidang pergelasan dan memperluas wawasan bagi penelitian dan pengembangan. PT X bertekad untuk menghasilkan kemasan gelas yang memiliki daya saing tinggi dalam hal mutu, harga maupun pelayanan serta berorientasi pada kepuasan pelanggan.

4.1.3 Struktur Organisasi PT X

Gambar 4
Struktur Organisasi PT X



Sumber : Struktur Manajemen PT X

Keterangan :

A	: Komisaris Utama	L	: Kadep Logistik
B	: Komisaris	M	: Kadep SDM Umum
C	: Direktur Utama	N	: Kadep Produksi
D	: Direktur Keuangan	O	: Merit system renumerasi
E	: Direktur Pemasaran	P	: Kom. logistic recurement
F	: Direktur Produksi	Q	: Komt. Quality mangmt ISO
G	: Kadep Keuangan	R	: Komt Kinerja perusahaan
H	: Kadep Produk Design	S	: Pekerja
I	: Kadep Pemasaran		
J	: Kadep Teknik		
K	: Kadep Akuntansi		

4.1.3 Gambaran Umum Produk X

PT. X selalu siap memenuhi semua kebutuhan pelanggan dengan memproduksi kemasan gelas dengan desain yang telah dibuat perusahaan dan juga permintaan khusus dari pelanggan. PT. X memproduksi kemasan gelas untuk berbagai keperluan industri seperti farmasi, minuman ringan, minuman beralkohol, Jar dan Saus, dan kosmetika. Untuk jenis Farmasi PT X memproduksi kemasan gelas untuk obat, minuman kesehatan, balsam, dan lain-lain. Untuk jenis minuman PT X memproduksi kemasan gelas untuk minuman berkarbonat, sirup, susu, dan lain-lain. Sedangkan untuk jenis minuman beralkohol, PT X memproduksi kemasan gelas untuk bir, anggur, minuman keras, dan lain-lain.

PT X juga memproduksi kemasan botol dan toples untuk selai, kecap, saus, dan lain-lain untuk produk-produk sausa dan Jar. Selain itu PT X memproduksi kemasan botol untuk parfum, sampo, dan lain-lain Untuk memproduksi botol kaca selain menggunakan tenaga Listrik mesin-mesin Produksi pada umumnya juga menggunakan Compressor sebagai Tenaga yang digunakan untuk menggerakkan mekanik mesin dan proses pembentukan Botol Kaca yang biasa disebut '*air pressure*' (udara tekan). Untuk pembentukan Botol Kaca diperlukan Pressure yang stabil dan kualitas udara yang bersih (kering, tidak mengandung kadar air).

Untuk menjamin kualitas udara yang bersih (tidak mengandung kadar air), maka PT. X telah meng-install *PRE COOLING* sejak pabrik di B beroperasi (Tahun 1977) *PRE COOLING* berfungsi untuk memberikan jaminan kepada Compressor

bahwa udara yang dihisap oleh Compressor dalam kondisi bersih dan tidak mengandung kadar air temperatur udara keluar *PRE COOLING* atau masuk Compressor sampai 5 derajat Celcius

4.2 Hasil Analisis

Dari gambaran umum yang diperoleh, PT X merupakan perusahaan nasional dengan komposisi kontribusi yang dapat dilihat dari tabel

Tabel 4.1
Equitas dan Share holder

Equitas			
Modal Dasar		Modal Disetor	
• Nominal	120.000.000.000	• Nominal	47.007.000.000
• Jumlah Saham	120.000	• Jumlah Saham	47.007

ShareHolder	
Pemerintah RI	63.82 %
BNI	36.18 %

Sumber: Profil Perusahaan PT X

Pemerintah hampir menguasai 65% saham kepemilikan atas PT X, sedangkan sisanya 35% sekitar Rp. 42.000.000.000 (empat puluh dua milyar) merupakan pinjaman modal dari BUMN dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Sehingga tidak ditemukan adanya investor dari pihak asing, namun tidak menutup kemungkinan dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan untuk masa mendatang, PT X melakukan go public bagi investor luar maupun dalam negeri. Hal ini tercermin dari kerjasama yang telah dilakukan dengan klien dari luar negeri dalam hal pemasaran.

Tabel 4.2
Laba rugi Fiskal tahun 2000-2001

Laba (Rugi) tahun 2000-2001		
<i>(Dalam Ribu Rupiah)</i>		
Akun	2000	2001
PENJUALAN BERSIH	204.034.077	265.519.276
BEBAN POKOK PENJUALAN	129.053.690	159.421.380
PENDAPATAN KOTOR	74.980.387	106.097.896
BEBAN USAHA	40.308.789	37.370.248
LABA (RUGI) USAHA SEBELUM BEBAN BUNGA	34.671.598	68.727.648
Beban Bunga	22.232.656	21.772.048
LABA (RUGI) USAHA SETELAH BEBAN BUNGA	12.438.942	46.955.600
PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA		
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(63.250.115)	(21.385.446)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	4.666.857	(4.652.781)
Keuntungan Restrukturisasi Hutang	0	10.323.427
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(46.144.316)	20.917.373
Pendapatan (Beban) Pajak	0	52.564.125
LABA (RUGI) BERSIH	(46.144.316)	83.804.925

Sumber : Laporan keuangan PT X tahun 2001

Tabel 4.3

Laporan Laba Rugi Fiskal tahun 2001-2002

Laba (Rugi) tahun 2001-2002		
<i>(Dalam Ribu Rupiah)</i>		
Akun	2001	2002
PENJUALAN BERSIH	265.519.276	220.972.731
BEBAN POKOK PENJUALAN	159.421.380	148.717.035
PENDAPATAN KOTOR	106.097.896	72.255.696
BEBAN USAHA	37.370.248	35.660.334
LABA (RUGI) USAHA SEBELUM BEBAN BUNGA	68.727.648	36.595.362
Beban Bunga	21.772.048	14.268.699
LABA (RUGI) USAHA SETELAH BEBAN BUNGA	46.955.600	22.326.663
PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA		
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(21.385.446)	30.350.230
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(4.652.781)	(11.156.841)
Keuntungan Restrukturisasi Hutang	10.323.427	35.600.081
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	20.917.373	77.120.133
Pendapatan (Beban) Pajak	52.564.125	(18.659.068)
LABA (RUGI) BERSIH	83.804.925	58.461.065

Sumber : Laporan Keuangan PT X Tahun 2002

Tabel 4.4
Laporan Laba-Rugi Fiskal Tahun 2003-2004

Laba (Rugi) tahun 2003-2004		
	<i>(Dalam Ribu Rupiah)</i>	
Akun	2003	2004
PENJUALAN BERSIH	186.897.540	228.403.787
BEBAN POKOK PENJUALAN	165.733.435	186.199.203
PENDAPATAN KOTOR	21.164.105	42.204.584
BEBAN USAHA	38.460.625	48.939.844
LABA (RUGI) USAHA SEBELUM BEBAN BUNGA	(17.296.520)	(6.735.260)
Beban Bunga	6.383.492	5.997.459
LABA (RUGI) USAHA SETELAH BEBAN BUNGA	(23.680.013)	(12.732.719)
PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA		
Laba (Rugi) Selisih Kurs	6.807.315	(11.129.748)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(6.740.890)	16.644.388
Keuntungan Restrukturisasi Hutang	0	0
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(23.613.588)	(7.218.079)
Pendapatan (Beban) Pajak	6.722.570	(1.886.752)
LABA (RUGI) BERSIH	(16.891.018)	(9.104.831)

Sumber : Laporan Keuangan PT X Tahun 2003

Tabel 4.5

Laporan Laba-Rugi Fiskal Tahun 2004-2005

Laba (Rugi) tahun 2004-2005		
	<i>(Dalam Juta Rupiah)</i>	
Akun	2004	2005
PENJUALAN BERSIH	228.404	0
BEBAN POKOK PENJUALAN	(186.199)	0
PENDAPATAN KOTOR	42.205	0
BEBAN USAHA :		
- Biaya Penjualan	(31.739)	0
- Biaya Umum dan Administrasi	(17.201)	0
Jumlah Beban Usaha	(48.940)	0
LABA USAHA SEBELUM BEBAN BUNGA	(6.735)	0
Beban Bunga	(5.997)	0
LABA USAHA SETELAH BEBAN BUNGA	(12.733)	0
PENDAPATAN/(BEBAN) DILUAR USAHA :		
- Pendapatan Diluar Usaha	24.574	0
- Beban Diluar Usaha	(7.930)	0
Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	16.644	0
LABA/(RUGI) SEBELUM SELISIH KURS	3.912	0
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(11.130)	0
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(7.218)	0
PENDAPATAN/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN :		
- Tahun Berjalan	3.518	0
- Kerugian Tahun Sebelumnya Yang Dapat Dikompensasi	(5.405)	0
Jumlah Pendapatan/(Beban) Pajak Penghasilan	(1.887)	0
LABA/(RUGI) BERSIH	(9.105)	0

Sumber : Laporan Keuangan PT X tahun 2004

Dalam laporan (rugi)-laba periode 2004-2005, dapat diketahui bahwa sebagian pendapatan perusahaan diterima dalam bentuk valuta asing (dollar). Ini

tercermin dari terdapatnya rugi selisih kurs sebesar 11.130 sebelum pajak. Namun karena terdapat keuntungan sebelum selisih kurs sebesar 3.912, maka rugi akibat selisih kurs dapat dikurangi menjadi 7.218 sebelum pajak. Dalam hal ini perusahaan menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Sehingga pembebanannya dilakukan pada akhir tahun.

Pada kasus PT X, penjualan dan piutang yang timbul dari transaksi mata uang asing tidak dapat dijabarkan sesuai dengan data perusahaan yang sesungguhnya mengingat jumlah data yang diperkenankan untuk dianalisis hanya berupa data-data yang umum. Sehingga perhitungan penjualan dan piutang diasumsikan sebagai berikut :

Awal tahun 2001 diketahui penjualan bersih sebesar Rp. 265.519.276 , maka pencatatan PT X adalah sebagai berikut :

<i>Piutang Dagang</i>	<i>Rp. 265.519.276</i>
<i>Penjualan</i>	<i>Rp. 265.519.276</i>

Adapun perhitungan laba rugi PT X atas selisih kurs dapat dijabarkan sebagai berikut :

Diketahui :

- kurs awal tahun 2001 sebesar Rp. 9.595/1 US\$
- kurs akhir tahun 2001 sebesar Rp. 10.965/1 US \$

maka selisih kurs akhir tahun

$$= 10.965 - 9.595 = \text{Rp. } 1.037,-$$

Pendapatan perusahaan dari laporan laba rugi fiskal diketahui rugi selisih kurs yang diterima sebesar

$$= 20.622 \times 1.037 = (21.385.446)$$

sehingga diketahui rugi dari selisih kurs sebesar \$20.622

pada awal tahun, jurnal yang digunakan untuk mencatat terjadinya pinjaman adalah

<i>Persediaan</i>	xxxxxxx	
<i>Hutang dagang</i>		xxxxxxx

jurnal yang digunakan untuk mencatat kerugian hutang akibat selisih kurs adalah :

<i>hutang dagang</i>	xxxxxxx	
<i>kerugian pertukaran mata uang</i>	xxxxxxx	
<i>kas</i>		xxxxxxx

dalam hal ini perhitungan diatas hanya merupakan asumsi, mengingat keterbatasan data, sehingga tidak diketahui total investasi dan pinjaman yang dimiliki PT X.

PSAK No. 10 untuk transaksi mata uang asing mengatur bahwa kas atau jumlah uang yang menjadi beban bagi atau untuk perusahaan yang dinyatakan dalam mata uang asing harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs sekarang pada tanggal neraca. Ini juga berarti bahwa keuntungan serta kerugian dalam transaksi mata uang asing tidak boleh ditangguhkan sampai mata uang asing dikonversikan ke dalam mata uang domestik (Rp) atau sampai piutang-piutang yang berhubungan sudah diterima atau hutang sudah dibayar. Sebaliknya, jumlah-jumlah ini harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs sekarang pada tanggal neraca dan semua keuntungan serta kerugian yang timbul dari penyesuaian harus diperhitungkan dalam laba rugi periode terjadinya.

Dalam penjelasan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perpajakan menyatakan bahwa *jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan pada ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiscal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapat kerugian tersebut.*

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 menyatakan bahwa *kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari atau oleh adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan system pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan system pembukuan berdasarkan kurs tetap, (kurs histories), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan system pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia. Atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan pemerintah dalam bidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut.*

Dari gambaran singkat di atas, perusahaan yang mengalami kerugian akibat selisih kurs, maka kondisi tersebut juga diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.04/1997 dan SE No.16/PJ.43/1997 tentang adanya opsi untuk melakukan amortisasi selisih kurs tahun 1997.

Dalam SE-54/PJ.42/1999 ditegaskan antara lain bahwa bagi WP yang telah memberitahukan kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar untuk memilih melakukan amortisasi pembebanan kerugian selisih kurs untuk tahun 1997 dalam jangka waktu 5 tahun, dapat memperhitungkan seluruh sisa kerugian selisih kurs tahun pajak 1997 yang merupakan beban amortisasi tahun pajak 1998 dan tahun-tahun pajak berikutnya secara sekaligus dengan keuntungan selisih kurs pajak tahun 1998. dalam hal setelah perhitungan tersebut masih terdapat sisa kerugian selisih kurs tahun pajak 1997, maka sisa kerugian tersebut tetap harus diamortisasi dalam jangka waktu sisa masa pembebanan amortisasi terhitung sejak tahun pajak 1998.

Ketentuan yang memberikan opsi untuk dilakukan amortisasi di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya UU PPh mengenai selisih kurs tersebut berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dengan masa manfaat tidak lebih dari satu tahun. Dalam kutipan ketentuan UU PPh tentang perlakuan terhadap selisih kurs yaitu UU PPh (UU no 17 tahun 2000) dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l menyatakan keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan objek Pajak Penghasilan. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) UU no. 17 Tahun 2000, kerugian selisih kurs mata uang asing dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Maka

perusahaan dapat melakukan penghitungan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan pada ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

Bagaimana jika perusahaan mengalami keuntungan akibat selisih kurs? Apakah perusahaan berhak melakukan kapitalisasi terhadap keuntungan selisih kurs? Sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan objek pajak penghasilan. Keuntungan ini dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter.

PT X sendiri selama beroperasi sejak awal krisis tahun 2000 hingga saat ini, belum pernah mengalami keuntungan akibat selisih kurs, sehingga dalam prakteknya tidak ada keuntungan yang dapat dikapitalisasikan ataupun diperlakukan sebagai objek pajak penghasilan atas keuntungan dari selisih kurs.

Pemerintah tetap memiliki peraturan perpajakan yang mengkondisikan apabila perusahaan mengalami keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk dikapitalisasikan atas biaya bunga dan biaya overhead sesuai dengan Surat Edaran No. SE-22/PJ.42/1999 tentang perlakuan PPh atas biaya bunga dan biaya overhead dalam masa konstruksi yang dapat dikapitalisasi. Adapun kutipan dari sebagian SE tersebut adalah "...Bunga pinjaman dan biaya overhead termasuk dalam biaya untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengeluaran (biaya) untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau 11A.

Apabila keuntungan kurs diperoleh akibat dari selisih kurs pinjaman (hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek) maka perlakuan yang diperkenankan adalah jika suatu pinjaman dipergunakan untuk membiayai pembangunan pabrik atau bangunan lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, biaya bunga yang timbul selama masa konstruksi harus dikapitalisir ke dalam harga perolehan pabrik/bangunan lainnya tersebut, yang pembebanannya melalui biaya penyusutan. Dalam hal suatu pinjaman dipergunakan untuk membiayai pembelian tanah, biaya bunganya harus dikapitalisir ke dalam harga perolehan tanah, namun tidak dapat dibebankan sebagai biaya penyusutan. Apabila suatu pinjaman digunakan untuk membiayai pembangunan pabrik dan pembelian tanah serta aktiva lainnya yang tidak dapat dipisah-pisahkan perhitungan kapitalisasinya ke dalam masing-masing aktiva tersebut dapat dilakukan secara prorata....”

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa biaya bunga yang timbul selama masa konstruksi harus dikapitalisir untuk memenuhi prinsip *“Matching cost against revenue”*

Selisih Kurs juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 10 tentang Transaksi dalam mata uang asing. Dimana suatu perusahaan dapat

melakukan aktivitas yang menyangkut valuta asing (*foreign activities*) dalam dua cara; melakukan transaksi dalam mata uang asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri (*foreign operations*). Pada paragraph 11, 13 hingga 17 menjelaskan perlakuan akuntansi yang diharuskan sehubungan dengan selisih kurs atas transaksi dalam mata uang asing. Paragraph tersebut juga mencakup perlakuan wajib (*benchmark treatment*) untuk selisih kurs sebagai akibat devaluasi atau depresiasi luar biasa suatu mata uang yang tidak memungkinkan dilakukannya *hedging* dan yang menimbulkan kewajiban tak terselesaikan sehubungan dengan perolehan aktiva dalam mata uang asing. Selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian (*settlement date*) pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaiannya suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut, namun jika timbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode. Dalam hal ini selisih kurs yang dialami PT X merupakan selisih kurs dari periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari laporan laba(rugi) periode 2004 –2005, dimana terdapat kompensasi kerugian dari periode sebelumnya sebesar 5.405. kompensasi kerugian tersebut diperkirakan akibat dari selisih kurs yang ditimbulkan pada transaksi keuangan periode sebelumnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 26 tentang Bunga Pinjaman bertujuan untuk menentukan perlakuan akuntansi atas biaya pinjaman.

Secara umum standar ini mengharuskan pembebanan segera biaya pinjaman pada saat terjadinya. Akan tetapi, untuk biaya pinjaman yang secara langsung dapat didistribusikan dengan perolehan, konstruksi atau produksi dari suatu *Qualifying asset*, standar ini mengharuskan kapitalisasi biaya pinjaman tersebut. *Qualifying asset* (Aktiva tertentu yang memenuhi syarat) adalah aktiva yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan untuk dijual sesuai dengan tujuannya. Paragraph 6 PSAK No.26 memberikan penjelasan tentang biaya pinjaman tersebut meliputi antara lain selisih kurs atas pinjaman dalam valuta asing (sepanjang selisih kurs tersebut merupakan penyesuaian terhadap biaya bunga) atau amortisasi premi kontrak valuta berjangka dalam rangka hedging dana yang dipinjam dalam valuta asing.

Paragraph 6 PSAK No. 26 secara eksplisit juga tidak menyebut selisih kurs atas pinjaman dalam valuta asing tersebut sebagai “keuntungan” atau “kerugian”. Malahan memberikan limitasi yaitu “sepanjang selisih kurs tersebut merupakan penyesuaian terhadap biaya bunga”. Sehingga perlakuan terhadap keuntungan dan kerugian akibat selisih kurs PT X disesuaikan dengan kondisi peraturan pemerintah.

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis selisih kurs dan aspek perpajakan terhadap selisih kurs di PT X, maka dapat kita dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa :

1. Perlakuan perpajakan terhadap selisih kurs telah secara jelas telah diatur dalam Undang-undang no. 17 tahun 2000 yang mana UU Perpajakan tidak mengenal adanya “kapitalisasi” kerugian atau keuntungan selisih kurs, kecuali kalau ada kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter.
2. Jika PT X mengalami kerugian setelah penghasilan bruto dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya setelah terjadinya kerugian.
3. Dari sisi akuntansi, biaya bunga dalam masa konstruksi memang dapat dikapitalisasi untuk memenuhi prinsip “*matching cost against revenue*” sedangkan penghasilan yang berkaitan dengan satu periode akuntansi harus diakui semuanya pada periode itu.
4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 10, juga membahas kemungkinan adanya selisih kurs akibat dari kegiatan usaha luar negeri, yaitu kegiatan yang merupakan bagian integral dengan operasi perusahaan.

5. PSAK No. 26 secara eksplisit juga tidak menyebut selisih kurs atas pinjaman dalam valuta asing tersebut sebagai “keuntungan” atau “kerugian” dan memberikan limitasi yaitu “sepanjang selisih kurs tersebut merupakan penyesuaian terhadap biaya bunga”.
6. Sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan objek Pajak Penghasilan. Apabila PT X mengalami keuntungan maka pengakuan laba/kerugian selisih kurs dapat dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor selisih kurs dan aspek perpajakan atas selisih kurs pada PT X, saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Perusahaan dapat lebih meningkatkan kualitas produknya dengan mengikut sertakan investor asing untuk menginvestasikan modal kerjanya sehingga untuk masa-masa mendatang visi misi perusahaan dapat terealisasi secara maksimal.
2. Dengan keberadaan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar yang mampu memberi jaminan kelangsungan hidup perusahaan, seharusnya bisa lebih meningkatkan pangsa pasar hingga ke mancanegara yang selanjutnya dapat meningkatkan aktivitas kegiatan usaha luar negeri (*foreign operations*).

3. Perusahaan dapat lebih transparansi atas pelaporan keuangan untuk transaksi mata uang asing yang meliputi penentuan kurs yang digunakan dan pengakuan pengaruh keuangan dari perubahan kurs valuta asing dalam laporan keuangan.
4. Berdasarkan kesimpulan di atas telah diungkapkan bahwa Undang-undang perpajakan No. 17 tahun 2000 tidak mengenal kapitalisasi atas selisih kurs baik itu kerugian maupun keuntungan, sehingga apabila terjadi kerugian selisih kurs, perusahaan hanya dapat melakukan pembebanan yang mengakibatkan berkurangnya laba begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, selayaknya aktivitas luar negeri dapat dilaporkan secara terpisah.
5. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan tidak hanya menganalisis selisih kurs dari sisi akuntansi dan perpajakannya saja, namun dapat lebih memperluas pembahasan sehingga perubahan nilai tukar dan dampaknya bagi perusahaan dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andajaya, Feri. 2004. *Pengaruh Suku Bunga pada Nilai Tukar*, Majalah Gema Swadharma, PT. Swadharma Eragrafindo Sarana. Jakarta
- Aviyanto, Ahwan. 2001, *Faktor-faktor Penentu Pergerakan Nilai Tukar Rupiah di Indonesia (Aplikasi Teori-teori) periode 1979-1999* (skripsi) Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Jakarta.
- A. Beams, Floyd and Amir Abadi Jusuf. 2000, *Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Choi, Frederick D.S and Gerhard G. Mueller. 1998. *Akuntansi Internasional edisi kedua*. Diterjemahkan oleh Maudy Waraouw, SE, Ak. Salemba Empat. Jakarta.
- Dornbusch, Rudiger, 1987. *Exchange Rate and Prices*. American Economic Review, vol 77, no 1, March.
- Humprey, Thomas M and Robert E. Keleher, 1982. *The Monetary approach to Balance of Payment, Exchange Rate, and World Inflation*. New York.
- Krueger, Anne. 1983. *Exchange rate Determination*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Lipsey, Richard G. 1997. *Pengantar Makro Ekonomi edisi kesepuluh*. Diterjemahkan oleh Ir. Agus Maulana MSM. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

Nasution, Anwar. 1997. *Kondisi Sistem Keuangan Indonesia dalam Memasuki Era Persaingan Bebas*. Jakarta

Yin, Robert K, 2000. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Yani, Ahmad, 2004 *Seri Praktis Perpajakan Solusi Masalah Pajak Penghasilan* . Prenada Media. Jakarta

Zain. Mohammad. Syarief Hidayat, 2004 *Himpunan Undang-undang Perpajakan 2003*



Lampiran 2

Laporan Kontribusi PT X Tahun 2000			
Tahun 2000 (Rp. Jutaan)			
• Dividen	0,00	• Pajak Penghasilan Badan	400,00
• Pajak Pertambahan Nilai	8.985,00	• Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut	4.585,00
• Pajak Bumi Bangunan		81,00	
		• 4668.00	0,00
Tahun 1999 (Rp. Jutaan)			
• Dividen	0,00	• Pajak Penghasilan Badan	0,00
• Pajak Pertambahan Nilai	6.008,00	• Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut	2.931,00
• Pajak Bumi Bangunan		163,00	
		• 786.00	0,00

Lampiran 3

Laporan Arus Kas PT X Tahun 2003-2004		
<i>(Dalam Ribu Rupiah)</i>		
Akun	2003	2004
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
Penerimaan Kas dari Pelanggan	197.537.925	258.791.993
Pembayaran Kas Kepada Pihak Ketiga & Karyawan	(160.806.542)	(219.405.219)
Kas yang Dihasilkan Dari Operasi	36.731.383	39.386.775
Penerimaan Lain-lain	5.737.354	2.770.888
Pembayaran Pajak	(13.864.992)	(17.051.572)
Jumlah Kas Dari Aktivitas Operasi	28.603.746	25.106.091
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :		
Penempatan Investasi Sementara dan Pencairan Deposito	6.000.000	6.100.000
Penerimaan Deposito dan Jasa Giro	490.772	281.856
Penambahan Aktiva Tetap	(8.235.051)	(1.277.756)
Jumlah Kas Dari Aktivitas Investasi	(1.744.279)	5.104.100
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Bantuan PKBL	0	0
Pembayaran Pinjaman Bank dan Bunga	(24.016.653)	(15.827.527)
Pembayaran Beban Restrukturisasi/ Privatisasi	(211.693)	107

Pembayaran Beban Restrukturisasi/ Privatisasi	(211.693)	107
Jumlah Kas Dari Aktivitas Pendanaan	(24.228.347)	(15.827.420)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	2.631.120	14.382.771
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	7.229.504	9.860.624
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	9.860.624	24.243.395

Sumber : Laporan Arus Kas PT X 2003-2004



Lampiran 4

Laporan Neraca Keuangan PT X Tahun 2003-2004

Neraca tahun 2004-2005		
<i>(Dalam Juta Rupiah)</i>		
Akun	2004	2005
AKTIVA		
AKTIVA LANCAR		
- Kas dan Setara Kas	24.243	0
- Piutang Usaha	32.262	0
- Piutang Lain-lain	22.212	0
- Sediaan	38.810	0
- Uang Muka Pembelian	821	0
- Uang Muka Pajak	1.331	0
- Uang Muka Lain-lain	990	0
- Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	634	0
- Biaya Dibayar Dimuka	1.459	0
Jumlah Aktiva Lancar	122.762	0
AKTIVA TETAP	94.171	0
AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	30.810	0
AKTIVA TAK BERWUJUD	666	0
AKTIVA LAIN-LAIN	882	0
JUMLAH AKTIVA	249.291	0
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
- Hutang Bank	20.607	0
- Wesel Bayar	16.257	0
- Hutang Usaha	20.059	0
- Hutang Lain-lain	3.032	0
- Hutang Pajak	281	0
- Hutang Kepada Pemerintah	5.568	0
- Hutang PUKK dan Bina Lingkungan	1.169	0
- Biaya Yang Masih Harus Dibayar	7.905	0
- Uang Muka Pelanggan	1.424	0

- Hutang Lain-lain Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	48	0
Jumlah Kewajiban Lancar	76.351	0
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
- Hutang Bank	44.843	0
- Wesel Bayar	38.321	0
- Hutang Lain-lain	6.412	0
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	89.576	0
EKUITAS		
- Modal Saham	47.007	0
- Agio Saham	94.583	0
- Defisit	(58.225)	0
Jumlah Ekuitas	83.365	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	249.291	0

Sumber : Laporan Keuangan PT X Tahun 2004

Lampiran 5

PERATURAN PERPAJAKAN TENTANG SELISIH KURS

Beberapa peraturan yang juga mengatur mengenai perlakuan selisih kurs antara lain:

1. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs.
2. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-12/PJ.43/1997 Tanggal 28 Agustus 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Valuta Asing Dalam Tahun 1997 (Seri PPh Umum Nomor 48).
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.04/1997 Tanggal 26 Agustus 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Valuta Asing Dalam tahun 1997.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.04/1997 tanggal 21 Nopember 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Dalam Tahun 1997.
5. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-16/PJ.43/ 1997 Tanggal 27 Nopember 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Valuta Asing Dalam tahun 1997 (Seri PPh Umum nomor 51)
6. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ.42/1998 Tanggal 5 Agustus 1998 tentang Penghasilan Atas Keuntungan dari Selisih Kurs.

7. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.42/1998 tanggal 25 Agustus 1998 tentang Pembebanan Rugi Selisih Kurs Tahun 1997 bagi WP merger.
8. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-46/PJ.42/1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Penegasan Lebih Lanjut Mengenai Perlakuan PPh Terhadap Selisih Kurs Valuta Asing.
9. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-54/Pj.42/1999 tanggal 8 Desember 1999 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.43 /1997 tanggal 27 Nopember 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Valuta Asing dalam Tahun 1997.
10. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-08/PJ.42/2000 Tanggal 18 April 2000 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Laba/Rugi Selisih Kurs Atas Perkiraan Hutang Kepada Kantor Pusat Bagi BUT.